Mahkamah NEWS
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Edisi 01/XII

# Justisia, Sudah Idealkah?

**Yang abadi dalam hidup adalah perubahan. Disaat semua yang telah ada dirasakan tidak sesuai lagi, maka perubahanlah yang dilakukan. Perubahan yang menggebrak pun dilakukan oleh Fakultas Hukum-Universitas Gadjah Mada (FH-UGM). Ketika beberapa waktu yang lalu, dilakukan suatu perombakan besar-besaran yang disertai dengan peleburan Senat dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menjadi satu lembaga baru yang masih prematur bertitel "JUSTISIA". Tapi, banyak yang menganggap pembentukan Lembaga ini terlalu cepat dan terkesan dipaksakan. Benarkah?**

Memang tak banyak yang tahu gonjang-ganjing yang terjadi di tubuh Senat dan BEM yang lalu. Menurut Uchenk, pencetus ide peleburan itu, keberadaan Senat Mahasiswa saat ini sudah tidak relevan lagi. Senat Mahasiswa yang pada awalnya timbul sebagai reaksi dari NKK/BKK yang mengekang demokrasi. Jadi, di era yang demokratis seperti sekarang ini, sudah tidak bisa diandalkan lagi. Ternyata, ide ini pun mendapat sambutan hangat dari BEM sendiri, sehingga setelah ada kesepakatan, dimulailah publikasi wacana penggabungan Senat dan BEM itu di FH selama beberapa minggu. Follow up dari wacana itu, diadakanlah referendum untuk memilih nama baru bagi institusi yang nantinya akan mencakup tugas eksekutif dan legislatif mahasiswa di FH. Dalam referendum itu ada beberapa opsi nama baru diantaranya yaitu Dewan Mahasiswa, Justisia,dan Keluarga Mahasiswa Hukum. Akhirnya, Justicia menjadi pilihan terbanyak peserta referendum.Setelah nama terpilih, dilanjutkan pula dengan pemilihan ketua Justicia. Pemilihan inipun tak lepas dari kontroversi, ketika ternyata secara mengejutkan, Ahmad Suryono (Kandidat Angkatan 2000) terpilih sebagai 'kepala suku' setelah menyingkirkan 7 kandidat yang lain. Tak banyak yang menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Hal ini dirasakan wajar ketika banyak yang meragukan kemampuan Ahmad, yang nota bene masih 'bau kencur' di lingkungan FH. Karena, jika dilihat dari kampanye 7 kandidat yang lain, mereka tidak bisa dianggap enteng. Selain lebih senior, rencana-rencana ke depan yang ditawarkan pun cukup menarik. Yah, itulah yang namanya politik, tak ada yang tak mungkin.

Dengan keberadaan Justisia sekarang ini, banyak yang menilai kinerjanya belum maksimal dan belum menunjukkan tajinya. Tapi, hal ini bisa dimaklumi oleh Supandrio (salah satu kandidat angkatan 1999), karena banyak yang menghalangi Ahmad cs dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari keraguan terhadap legitimasi justisia, kekurangdewasaan person-person di FH yang merasa belum rela diatur oleh angkatan yang lebih junior, hingga terlambatnya penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BEM dan Senat, yang akhirnya berimbas pula dengan pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran rumah Tangga (AD/ART). Tapi Ahmad tidak setuju dengan keraguan

terhadap legitimasi Justicia. Karena ia menilai keberadaan Justisia sekarang adalah produk demokrasi, mulai dari memfloorkan wacana peleburan, proses referendum hingga Pemira, dilakukan secara terbuka dan demokratis. Hal ini pun tak disangkal Uchenk, "Justisia ini sudah legitimate kok! Mungkin yang dipertanyakan adalah legitimasi kekuasaan saja". Ahmad pun melihat persoalan legitimasi kekuasaan adalah hal yang wajar ketika seorang mahasiswa 'anyar' menduduki posisi ini. Tapi, Supandrio menilai bahwa justru dengan belum jelasnya legitimasi inilah yang dapat menghalangi ahmad dalam menjalankan tugasnya. Karena belum adanya AD/ART, ibarat orang berjalan tanpa tujuan. Sehingga yang patut dipertanyakan adalah kenapa penyampaian LPJ Senat dan BEM bisa tertunda? Ketika dikonfirmasi tentang hal ini, Ahmad mengatakan bahwa terjadi ketidaksesuaian dan tidak adanya waktu yang cukup bagi Senat dan BEM untuk bertemu. Hal ini dikarenakan banyak anggotanya yang masih mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata). Tak bisa dipungkiri pula hal itu berimbas pada tertundanya pelaksanaan SIMA (Sidang Mahasiswa). Tugas dan beban berat memang ada di pundak Justisia sekarang ini. Hal terpenting yang harus diagendakan sekarang ini adalah bagaimana

merangkul seluruh elemen-elemen yang ada di FH ini. Karena, jika dilihat selama ini, kurang adanya kekompakan antar Lembaga Semi Otonom (LSO) yang ada, dan masing-masing terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dan permasalahan ini pula yang menjadi kelemahan dari BEM yang lalu, dimana aspirasi teman-teman sulit tersalurkan karena payahnya koordinasi antara satu dengan yang lain. Selain itu ada sebuah harapan bahwa Justisia harus mampu melakukan perubahan-perubahan, terutama perubahan sikap tentang kebijakan-kebijakan dekanat. Oleh karena itu, saran Uchenk, Ahmad perlu menciptakan pressure group untuk menciptakan posisi tawar mahasiswa yang lebih baik. Fenomena-fenomena seperti pemilihan dekan, ketransparanan biaya, pungutan-pungutan liar, perlu mendapat perhatian khusus. Masukan juga muncul dari Pandrio, bahwa dalam melaksanakan tugas nantinya perlu adanya sebuah pengontrol bagi Justicia. Dan saat ini sedang ada 'penggodogan' untuk membentuk sebuah Lembaga Pertimbangan dan Konsultasi yang terdiri dari LSO-LSO dan wakil dari tiap-tiap angkatan.

Masalah teman-teman di ekstensi juga tidak bisa dikesampingkan. Tak bisa dielakkan bahwa ada yang masih kontra dan kurang simpatik dengan teman-teman ekstensi, karena masih terkesan sangat eksklusif. Tapi Ahmad menilai, walaupun kita harus mengakui adanya perbedaan anta mahasiswa ekstensi dan reguler, kehadiran ekstensi di era otonomi kampus ini, sangatlah penting. Kita harus melihat bahwa kehadirannya juga turut mendukung kelas reguler dan memajukan FH juga, khususnya dalam masalah financial.

Menilik dari realitas yang ada, tantangan berat bagi Justisia, namun tantangan itu tentunya bukan untuk ditakuti ataupun dihindari, tapi harus dijawab dengan sebuah kerja nyata yang sesuai dengan harapan. Semoga dengan keberadaan Justisia sekarang, polemik yang dulu pernah ada, tidak terjadi lagi. Atau dengan kata lain, jangan sampai Justicia hanya merupakan nama baru saja. Tentunya untuk merealisasikan hal ini tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama antar seluruh elemen yang ada di FH. Oleh karena itu Ahmad juga berharap semua pihak mau mendukung dan membantunya, serta menghilangkan sentimen angkatan yang sempat merebak. Selamat bekerja Justisia, kami tunggu prestasimu....... ■

(Rio, Inggit, Isti, Anita)

# Sidang Mahasiswa di Era Justisia

Hiruk pikuk Pemilihan Raya ( Pemira) usai sudah, Ahmad Suryono salah satu kandidat yang didukung oleh mayoritas mahasiswa angkatan 2000 terpilih menjadi ketua Justisia nama lembaga baru yang merupakan hasil peleburan fungsi Senat dan BEM FH UGM, Ahmad terpilih dengan jumlah suara kurang lebih 90, hanya selisih 15 suara dengan Supandrio salah seorang kandidat kuat lainnya.

Hasil yang cukup kontroversial, walaupun dinilai cukup demokratis, karena diantara lima kandidat, Ahmad Suryono lah kandidat yang paling junior dibandingkan dengan kandidat yang lain yaitu : Supandrio (angkatan 99), Arya Maheka (angkatan 98), Yunita (angkatan 99), dan Didik mas'adi (angkatan 98). Banyak nada sumbang seiring dengan terpilihnya Ahmad sebagai ketua Justisia, bisa dimaklumi memang keraguan yang muncul itu dengan alasan bahwa ini adalah lembaga baru yang tentu saja fungsinya lebih kompleks dari lembaga-lembaga sebelumnya, karena lembaga ini berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang dulu merupakan fungsi dari BEM sekaligus juga didalamnya memiliki fungsi pengawasan atau fungsi legislatif dulu dipegang oleh senat -, tentu saja kepengurusan Justisia ini harus membentuk AD/ ART yang baru dan segudang program yang tidak hanya sekedar merupakan program 'kewajiban' , hal inilah yang banyak menimbulkan komentar-komentar minor di beberapa kalangan karena Ahmad dianggap masih terlalu dini untuk memimpin lembaga ini. Walaupun sehari setelah Pemira dilaksanakan yaitu akhir Juni lalu, Majestic dan teater Apakah sebagai LSO kampus menyatakan dukungan terhadap Ahmad sebagai ketua Justisia terpilih dari pemilihan yang cukup demokratis.

Seiring dengan terpilihnya ketua Justisia dan kepengurusan yang baru , maka agenda yang telah menunggu adalah Sidang Mahasiswa (SIMA), SIMA adalah merupakan forum yang digelar untuk pertanggung-jawaban ketua Senat dan BEM demisioner. Seharusnya SIMA digelar secara otomatis setelah Pemira berhasil memilih kandidat baru ( ketua justisia ), tapi ternyata sampai saat ini SIMA belum juga terselenggara. "Sebenarnya ,penundaan pelaksanaan SIMA ini hanya teknis saja sifatnya ,sehubungan karena pada saat ini Ketua senat demisioner yaitu Zaenal Arifin M Husein dan ketua BEM, Very Iskandar ,sedang mengikuti KKN," ujar Ahmad Suryono, ketua Justisia terpilih kepada Mahkamah. "Sehingga berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan SIMA itu sendiri," tambahnya. Tapi ada jalan tengah yang dapat ditempuh, yaitu membagi jadwal SIMA dalam dua tahap , yaitu : SIMA tahap pertama dengan agenda utama penyerahan kekuasaan kepada Justisia dan SIMA tahap kedua, dengan agenda utama Laporan Pertanggung Jawaban ketua Senat dan BEM serta pembahasan AD/ART. Ahmad berharap agar pelaksanaan SIMA ini tidak terlalu lama tertunda seperti tahun-tahun sebelumnya, karena akan menghambat kinerja kepengurusan Justisia itu sendiri.Khusus untuk tahap pertama telah diadakan Senin (20/8) yang lalu dilantai tiga gedung Notariat.

Yang menarik dalam SIMA tahap kedua yang pelaksanaannya belum ditentukan ini adalah mengenai keinginan status KMPR menjadi Lembaga Semi Otonom, menarik karena ada tarik ulur antara LSO-LSO yang ada untuk menyepakati atau tidak mengenai perubahan status ini.Ada "luka lama" yang melatar belakangi semua itu,Karena salah satu tahap untuk menjadi LSO adalah adanya pengakuan atau legitimasi dari masyarakat FH termasuk dari LSO-LSO yang telah ada, tampaknya itulah yang kurang dimiliki oleh KMPR.Mengenai agenda lain yang akan dibahas juga adalah dana fakultas untuk LO dan LSO dan juga pembahasan tentang aspirasi mahasiswa yang masuk.

Dalam menyikapi SIMA ini KMFH sebagai salah satu LSO di FH ini, memandangnya sebagai suatu forum untuk saling bersilaturahmi, saling berinteraksi, diantara masing-masing LSO dan LO, dan juga sebagai tempat untuk mengungkapkan pendapat dan visi masing-masing agar dapat dijadikan sebagai masukan bagi FH untuk lebih dinamis, begitu ungkap Endi , ketua KMFH.

Kita semua sebagai anggota komunitas FH ini berharap agar SIMA dua yang akan berlangsung entah tepatnya kapan- ini ,bisa menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan yang bisa membawa FH ini ke arah yang lebih baik dengan tidak meninggalkan sikap kritis terhadap suatu apapun dan siapapun. Mudah-mudahan...... ■

(Adi,ery,ayu)

# Sekilas Tentang Justisia

Ide mengenai pembongkaran lembaga otonom utamanya senat dan BEM muncul kira-kira setahun yang lalu berkembang sebagai wacana mendapat respon cukup positif dari berbagai kalangan di FH ini, terutama mengenai penggabungan dari fungsi Senat dan BEM, selama ini dianggap bahwa kurang berfungsinya Senat dalam tugas kelembagaan karena fungsinya yang sebagai pengawas atau legislatif cenderung mandul. Dapat dipahami jika fungsi senat menjadi sangat rancu dengan tugas dan fungsi BEM, mengingat senat sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk mengawasi kinerja BEM dan juga untuk menampung aspirasi mahasiswa FH ,tetapi tidak mempunyai *bargaining position* yang cukup kuat dengan pihak dekanat. Hingga akhirnya wacana ini pun dengan melalui berbagai sosialisasi dapat disepakati bahwa pembentukan lembaga baru dengan fungsi ganda akan lebih efektif dan efisien .

Justisia adalah nama lembaga otonom baru yang merupakan hasil penggabungan fungsi dari Senat dan BEM. Nama "Justisia" sendiri muncul setelah diadakannya musyawarah mahasiswa yang menggagas tentang lembaga baru ini. Nama ini merupakan hasil dari usulan anggota musyawarah dan mendapat suara terbanyak dibanding usulan nama-nama lainnya.

Lembaga ini untuk pertama kali mengadakan Pemira yang dilaksanakan pada akhir Juni lalu, dengan lima kandidat yaitu : Supandrio, Yunita, Didik Mas'adi ,Arya Maheka, dan Ahmad Suryono untuk dipilih sebagai ketua Justisia. Melalui pemilihan yang bisa dikatakan demokratis dan melibatkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum baik reguler maupun ekstensi itu, akhirnya terpilihlah Ahmad Suryono sebagai ketua Justisia,walaupun banyak menimbulkan kontroversi yang mengungkapkan keragu-raguan akan kapabilitas Ahmad sebagai ketua Justisia mengingat bahwa Ahmad adalah kandidat termuda dalam Pemira tersebut sehingga kemampuannya dalam memimpin lembaga ini masih dipertanyakan.Dengan mengantongi kurang lebih diatas 90 suara, Ahmad berhasil menumbangkan empat kandidat yang lain, dari total suara pemilih sekitar 299 suara.

Penggabungan dua fungsi lembaga dalam Justisia ini menimbulkan banyak harapan yang muncul disertai dengan kegamangan-kegamangan, karena jangan-jangan fungsi lembaga ini secara formal tetap saja tidak 'bergigi' dihadapan Dekanat Jadi apalah arti sebuah sebuah lembaga baru jika tetap saja tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi dihadapan Dekanat dalam menyikapi aspirasi yang berkembang dikalangan mahasiswa FH UGM. Ketua Justisia mengatakan : " Kita adalah suatu lembaga yang inklusif, kita tidak ingin Justisia seperti menara gading sehingga sulit untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa " . " Kita akan lebih sering mengadakan forum antar LSO agar terjalin komunikasi dan juga sebagai forum silaturahmi antar LSO yang ada di FH ini," tandasnya. Ketika disinggung dimana letak kelebihan lembaga ini. Isu gap yang ada di FH memang sudah lama terdengar, dan itulah yang akan disikapi secara intens oleh Ahmad.

Ada lembaga pengawasan dalam Justisia yang merupakan lembaga tertinggi dan utama yang beranggotakan kekuatan-kekuatan riil yang ada di FH, seperti LSO dan angkatan. Lembaga ini berfungsi untuk meluruskan kebijakan-kebijakan yang salah arah, lembaga yang bernama Dewan Pengawas Mahasiswa ini berhak untuk memberikan rekomendasi untuk menggelar sidang umum mahasiswa seandainya terjadi penyelewengan dalam Justisia.Tapi semua ini baru hanya sebatas gagasan yang dilontarkan dan baru akan digodog dalam SIMA nanti.

**Didominasi Angkatan 2000.**

Kepengurusan yang telah dibentuk merupakan kewenangan penuh Ahmad Suryono sebagai ketua Justisia, ada satu departemen baru dalam kepengurusan kali ini yaitu departemen aspirasi dan pelayanan, diharapkan melalui departemen ini Justisia bisa menjadi lebih "peka". Secara sederhana, kepengurusan Justisia kali ini banyak dipegang oleh mahasiswa angkatan 2000, antara lain ketua yang dipegang oleh Gafar Febriansyah, ketua I ini membawahi empat departemen yaitu : Departemen Penalaran yang dipegang oleh Fahreza Al Fatah, Departemen Keuangan yang dipegang oleh Dewi Sekar, Departemen Aspirasi dan pelayanan yang dipegang oleh Agung (merupakan departemen baru) dan juga ada Departemen Organisasi yang dipegang oleh Budi, mereka semua adalah mahasiswa angkatan 2000. Dan juga ada ketua II yang dipegang oleh Firmansyah, ketua II ini pun membawahi empat departemen antara lain : Departemen ALSA (Asian Law Student Ascociation ) yang dipegang oleh Heriyanto (kali ini merupakan sosok dari angkatan 99), kemudian Departemen Hubungan luar yang dipegang oleh Rizki, Departemen Minat dan bakat dipegang oleh Dian, dan juga Departemen Pengabdian dipegang oleh Fifi. Sedangkan untuk posisi Sekjen diserahkan kepada Luki Dwi Nugroho ,angkatan 99,sekjen membawahi empat biro yaitu biro kesekretariatan, biro humas, biro administrasi, dan juga biro departemen.

**Kekurangan Aktivis**

Banyak tugas yang menanti dibawah kepengurusan mereka, tugas awal yang sudah ada di depan mata adalah program Penerimaan mahasiswa baru, agenda rutin tahunan dalam rangka menyambut mahasiswa baru. Adanya agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan ini diharapkan bukan hanya sekedar melaksanakan agenda "turunan" dari generasi sebelumnya, tapi kepengurusan ini juga bisa membuat program-program yang lebih inovatif dan berguna. Belum banyak terbentuknya aktivis mahasiswa yang 'sebenarnya' dalam arti kata bukan hanya sekedar aktivis-aktivis 'co-card' yang hanya aktif dalam suatu event-event tertentu saja, yang ketika ada suatu acara tertentu mereka beramai-ramai mendaftarkan diri setelah acara itu usai maka usai sudah aktifitas mereka. Pengasahan kepekaan sosial yang lebih dalam melihat kondisi riil yang dialami masyarakat kitalah yang sangat diharapkan, karena kita adalah mahasiswa fakultas hukum yang mau tidak mau akan bergelut dengan rasa "keadilan" yang tampaknya dari hari kehari semakin jauh untuk digapai oleh mayoritas rakyat Indonesia, banyaknya badut-badut hukum yang berseliweran dalam pentas hukum kita hendaknya menjadi renungan kita semua sebagai mahasiswa fakultas hukum. Semoga Justisia bisa mendobrak kebekuan yang ada.harapankah ini ? ■

(Ayu)

# Forbes Menggonggong SP Tetap Berlalu

Ada pendatang baru di kampus Fakultas Hukum ini . Siapakah dia? Mahkluk asing ini bernama FORBES ,Forum Bersama FH UGM yang dibentuk menjelang Semester Pendek beberapa waktu yang lalu. Forbes menggugat keberadaan Semester Pendek yang katanya terlalu mahal buat kantong mahasiswa Hukum. Lewat tuntutan mereka tertanggal 20 juni 2001. Forum Bersama menolak pemberlakuan semester pendek dengan pungutan biaya Rp. 15.000./ SKS. Ada 4 pertimbangan yang mereka cantumkan dalam surat pernyataan tersebut yaitu:

- Harga Rp. 15. 000 ./SKS di rasa tidak memenuhi rasa keadilan yang obyektif.
- Adanya fakultas yang dapat mengadakan SP dengan harga jauh di bawah Rp 15. 000.-
- Kenyataan bahwa tidak adanya transparansi penggunaan dana yang ada selama ini .
- Secara empiris tidak ada peningkatan kesejahtraan para karyawan honorer yang ikut membantu pelaksaan SP.

Berdasarkan 4 pertimbangan tersebut Forbes meminta pihak Dekanat untuk segera meninjau kembali pemberlakuan harga Rp 15.000.-/SKS tersebut. Mereka juga meminta adanya transparansi penggunaan dana dari pihak fakultas.

Surat pernyataan bernada menggugat itu di tandatangani oleh 11 orang anggota Forbes yaitu, Ahmad Suryono (ketua Justicia FH.), Zainal Ali Husein (wakil ankatan 97), Abhisam (ketua Majestik 55), Arfi Bambani A.(wakil angkatan 98), A. Muzakki (mahkamah), M. Hafidullah (wakil angkatan 99),Endi Lumban P. (KMFH), Ferdinan Anon (Teater Apakah), Veronika K.(PMK. FH),Andri .D(angkatan '00), dan Yoga Pratomo (KMK FH).

Forbes boleh menggonggong, SP tetap berlalu, itulah yang terjadi, gugatan Forbes ternyata sia-sia. Peserta SP tetap membayar biaya SP Rp. 15.000.- /SKS; dan tidak tanggung-tanggung ternyata lebih dari 200 mahasiswa FH UGM yang mengikuti SP kali ini. Hal ini menunjukan dikalangan mahasiswa FH Rp. 15.000.- bukan harga yang mahal dan tidak bikin kantong bolong. Di sini nampak perbedaan antara pendapat Forbes dengan mahasiswa, kalau begitu Forbes Mewakili siapa? Mewakili mahasiswa Fakultas Hukumkah atau mewakili diri mereka sendiri ?

Ahmad Suryono salah seorang anggota Forbes ketika dihubungi Mahkamah News beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Forbes dibentuk karena adanya kegelisahan kawan-kawan mahasiswa Hukum karena naiknya biaya SP kali ini. Maka untuk menyikapi hal tersebut kemudian Justicia mengundang kawan-kawan LSO dan wakil-wakil angkatan untuk bersama-sama menyikapi permasalahan biaya SP kali ini. Maka terbentuklah Forbes (Forum Bersama).

Aria Maheka (98) berpendapat bahwa Forbes tidak representatif karena orang-orang yang menandatangani surat pernyataan itu tidak mewakili LSO dan angkatan secara organisatoris. Jadi Forbes tidak berhak menyatakan bahwa Forbes mawakili mahasiswa FH UGM, lanjut Aria.

Senada dengan Aria, Saiku (00),berpendapat Forbes harus bertanggung jawab, kalau karena tuntutannya itu S P di hapus; "kalau nggak ada SP kami yang bodoh ini kapan wisudanya?"Bagi saya Rp. 15.000. itu tidaklah mahal-mahal amat,kalau dibanding kan dengan ilmu yang kita peroleh ; Kata Saiku berapi-api

Soal mahal tidaknya biaya SP kali ini memang relatif. Bagi mahasiswa berkantong tebal, Rp. 15.000 /SKS tidak menjadi masalah sehingga tidak ada gerutuan dari mereka, tetapi bagi kalangan mahasiswa berkantong tipis Rp.15.000 /SKS memang cukup mahal.Walaupun sempat ngomel dan bergerutu toh pada akhirnya mereka tetap mengikuti SP. Bagi mereka "manut dan nunut " untuk kebaikan adalah suatu keharusan.Dan lihatlah, ratusan mahasiswa hiasi kampus Justicia mulai Senin, 7 Juli 2001, untuk mengikuti SP. Ternyata Rp 15.000.-tidak jadi batu sandungan bagi mereka untuk mengikuti rangkaian kuliah SP 2001 ini . Memasuki minggu ke-6 SP,Mahkamah News berusaha menghubungi beberapa rekan mahasiswa untuk bertanya soal-soal seputar peyelenggaraan SP.Kepada Mahkamah News yang menghubungi mereka tangal 6 agustus hingga , 9 agustus 200 lalu , mereka berbicara banyak. Apa kata mereka tentang Forbes, SP, dan hal-hal seputar kampus? Mari kita dengarkan kisah kawan-kawan kita itu.

Aldo (00), Rani (00), dan Dini (00), bertutur jujur bahwa mereka tidak tahu soal keberadaan Forbes. Mereka merasa asing dengan Forbes. Bukannya mereka kuper tetapi karena Forbes kurang melakukan sosialisasi ke kalangan mahasiswa. Dini, seorang anggota Teater Apakah, mengaku bahwa dirinya benar-benar tidak tahu-menahu soal nama Forbes. Dia hanya tahu bahwa pernah ada aksi poster menentang biaya SP pada tanggal 19 juni 2001 lalu, memang Forbes melakukan aksi protes lewat poster-poster yang dipasang ditempat strategis di FH UGM. Diantaranya berjudul RAMPOK 1 SKS Rp 15.000.Tapi Dini cukup salut dengan apa yang dilakukan Forbes walaupun hasilnya kurang memuaskan. Untuk itu Ia menghimbau agar Forbes lebih menunjukan eksistensinya, supaya mendapat dukungan dari semua mahasiswa FH UGM.

Hampir senada dengan Dini, Rani, dan Aldo juga berpendapat bahwa tuntutan Forbes kurang realistis. Ditanya lebih lanjut Rani berkata bahwa Rp 15.000/ SKS tidaklah mahal " coba kita bandingkan dengan Fakultas Teknik yang 1 SKS Rp. 20.000, kita masih jauh lebih murah. Memang kalau dibandingkan dengan Fakultas Ilmu Budaya yang hanya Rp. 12.500/ SKS, Fakultas kita lebih mahal.Tapi itu wajar,sebab peserta SP di Fakultas Ilmu Budaya memang banyak, 1 kelas mencapai 400-an orang, malah ada yang tidak dapat tempat duduk. Jadi kita nggak boleh sama dong" ujar Rani ..

Hampir semua mahasiswa yang dihubungi Mahkamah News berpendapat bahwa biaya SP di FH tidak mahal, masih realistis dan tidak " merampok " seperti kata Forbes. Malah dengan nada gurau salah seorang mahasiswa angkatan 2000 berujar bahwa " bahwa kita mahasiswa-lah yang justru merampok waktu dan kesempatan berlibur para dosen dan karyawan." Ini gurauan lepas tapi ada benarnya..

Berbeda dengan suara-suara sebelumnya yang nampaknya tidak sependapat dengan Forbes, ada dua suara yang cukup kritis menanggapi aksi Forbes ini. Dua suara itu milik Wilowo (99) dan Adit (2000). Mereka cenderung sependapat dengan Forbes. Menurut mereka, kalau dihubungkan dengan fasilitas yang ada di FH UGM yang rada-rada " kere dan miskin " biaya SP kali ini

cukup mahal Wilowo berargumentasi,beban yang kita bayar untuk SP tidak sebanding dengan fasilitas yang kita dapat

Adit (00), setuju dengan Forbes dalam hal permintaan kepada pihak Fakultas untuk transparansi pengelolaan dana SP " yah, saya sependapat dengan Forbes yang meminta transparansi pengelolaan dana, supaya kita bisa tahu lari kemana uang-uang itu " ujar Adit ini.

Ahmad mengakui bahwa hasil yang diperoleh Forbes memang kurang memuaskan yaitu bahwa tuntutan untuk menurunkan biaya SP/ SKS tidak dipenuhi oleh pihak Fakultas. Menurutnya,, pihak Fakultas tetap tidak mau menurunkan biaya SP dengan alasan: Bahwa biaya SP ini merupakan kesepakatan bersama seluruh Fakultas di UGM dan bahwa biaya SP di FH UGM ini sudah termasuk paling rendah, bahwa dengan adanya krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan yang mengakibatkan naiknya BBM,dan Karena jumlah mahasiswa FH UGM yang mengambil SP ini lebih sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah peserta SP diFakultas Ilmu Budaya dan FISIPOL yang biaya SP nya Rp. 12. 500/SKS.

Di tanya mengapa sampai Forbes gagal, Ahmad berkomentar bahwa hal itu disebabkan karena kurang solidnya rekan-rekan Forbes sendiri. Ahmad menyesalkan beberapa temannya dari Forbes, yang seharusnya bersama Ahmad berdialog dengan pihak Fakultas tidak datang,sehingga Ia seorang dirilah yang berdialog dengan pihak Fakultas.Dan kita tahu hasil dialog itu ;biaya SP tetap berlaku Rp.15.000. Kekurang solid inilah yang disesalkan oleh mahasiswa yang dihubungi Mahkamah News , "Gimana bisa berhasil kalau Forbes ini aja nggak solid" gerutu Wilowo(99).

Orang bijak berkata,kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.Berpedoman pada petuah bijak ini paling tidak kita bisa belajar bahwa apa yang dilakukan telah dilakukan Forbes walaupun gagal,tapi telah menunjukan sikap yang tegas bahwa kita mahasiswa memiliki posisi tawar(bargaining position) yang cukup tinggi didepan pihak Fakultas.Dengan aksi ini,paling tidak mengingatkan dekanat bahwa tidak semua kebijakan Fakultas itu disetujui oleh mahasiswa.Untuk keberanian ini,kita patut beri applaus untuk Forbes.Tapi dari kegagalannya, marilah kita belajar,bahwa ternyata kita masih kurang solid. ■

(Andry/Nando)

## Profil MAHKAMAH

Berangkat dari idealisme mahasiswa untuk terus berjuang mencapai tata kehidupan yang demokratis dan menempatkan hukum yang berkeadilan sebagai panglima dalam masyarakat. Idealisme yang murni tanpa tendensi kecuali rasa tanggung jawab dan panggilan hati nurani untuk mengamalkan ilmu bagi kegunaan bersama. Idealisme itu berkumpul dalam wadah BPPM FH UGM "MAHAKAMAH" yang secara resmi berdiri pada 11 November 1989. Sebuah Badan Penerbit Pers Mahasiswa yang kritis terhadap realitas yang ada.

Sebagai sebuah komunitas Pers mahasiswa, datang dan pergi anggotanya adalah hal yang wajar. Pola *in house training*, Diklat, digunakan sebagai pembelajaran dan membentuk anggota "awak Mahkamah" baru menjadi insan Pers yang tangguh. Sikap kritis dan rasa tanggung jawab pad lingkungannya dipupuk lewat *sharing*, diskusi yang terus dilakukan secara berkala. Sehingga tercipta generasi penerus awak Mahkamah yang tetap memegang idealismenya baik secara individu maupun kolektif, sampai pada tahun ke-12 BPPM FH UGM MAHKAMAH saat ini.

*********

Secara garis besar ada sejumlah divisi dalam struktur organisasi MAHKAMAH. ***Keredaksian*** merupakan "roh" Persma ini, *the real jurnalism* ada pada divisi ini. ***Perusahaan*** adalah "nafas" awak Mahkamah dalam penyampaiannya ke masyarakat lewat distribusi produk Mahkamah. Litbang merupakan sarana pemberdayaan awak Mahkamah, baik itu melalui diskusi-diskusi maupun pengembangan wacana hukum dan sosial. ***Kesekretariatan***, dapat dikatakan sebagai pengatur rumah tangga Mahkamah, baik administratif maupun dalam menciptakan suasana sekretariatan yang nyaman, mottonya sih "home sweet home". Dan yang terakhir ***Bendahara***, "kantong uang" Mahkamah yang harus selektif dalam mengatur pengeluaran dana. Keseluruhan divisi ini di koordinasi oleh seorang "manajer" berwujud **pemimpin umum**.

# Mengenal Dunia Mahasiswa

Adalah merupakan suatu kebanggaan ketika seseorang menyandang predikat "mahasiswa" yang dalam asumsi masyarakat posisi ini dipercayai sebagai kelas tersendiri yang diharapkan nantinya mampu melakukan perubahan sosial menuju harapan yang dicita-citakan banyak orang.

Tahun 1998 merupakan sebuah catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia, dimana pada saat itu telah jatuh rezim otoriter yang berkuasa selama 32 tahun, dan hal ini dianggap tidak luput dari peran mahasiswa yang begitu besar.

Adanya opini yang terbentuk akan kemampuan besar yang dimiliki oleh mahasiswa dalam membawa menuju perubahan yang diinginkan, sungguhlah merupakan sebuah beban yang tidak ringan, disamping mahasiswa itu sendiri sebenarnya memiliki problematika yang tidak sedikit yang berada di lingkup dunia kampus...

Embrio-embrio munculnya perlawanan dari dunia kampus seringkali harus berhadapan dengan sikap represif dari birokrat kampus maupun militer yang merupakan perpanjangan tangan dari negara.

Disekitar tahun 1974, lembaga mahasiswa yang pada saat itu bernama Dewan Mahasiswa merupakan sebuah alat perjuangan politik mahasiswa yang sangat efektif di kampus. Dimana lembaga formal ini punya posisi tawar yang kuat terhadap birokrat kampus dan mampu bersuara lantang menentang kebijakan kampus yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan mahasiswa maupun kepentingan yang lebih besar (baca: rakyat).

Adanya militansi yang besar dari tubuh mahasiswa yang pada geraknya ternyata mampu menggandeng kekuatan rakyat yang real selama ini mengalami ketertindasan, ternyata dianggap merupakan suatu bahaya laten yang dianggap mengganggu stabilitas negara, sehingga serta merta diberlakukan tindakan represif yang pada akhirnya berujung dengan dikeluarkannya dikeluarkannya SK Mendikbud No. 0156/u/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang kemudian membubarkan Dewan Mahasiswa dan menggantinya dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang pada geraknya justru hanya merupakan alat dari birokrat kampus (negara) untuk meredam aktifitas politik mahasiswa. Tindakan represif seringkali harus diterima oleh mahasiswa yang coba menentang kebijakan negara dengan alasan mengganggu stabilitas.

Di UGM sendiri pada tahun 1991, dengan SK rektor, kemudian dibentuk Senat Mahasiswa yang fungsinya tidak bergeser dari apa yang menjadi kebijakan kampus ataupun negara sebagai sebuah kepentingan yang lebih luas.

Sedikit demi sedikit, akibat represifitas yang diberlakukan untuk meredam suara-suara tajam mahasiswa yang mencoba mengkritisi sikap negara,
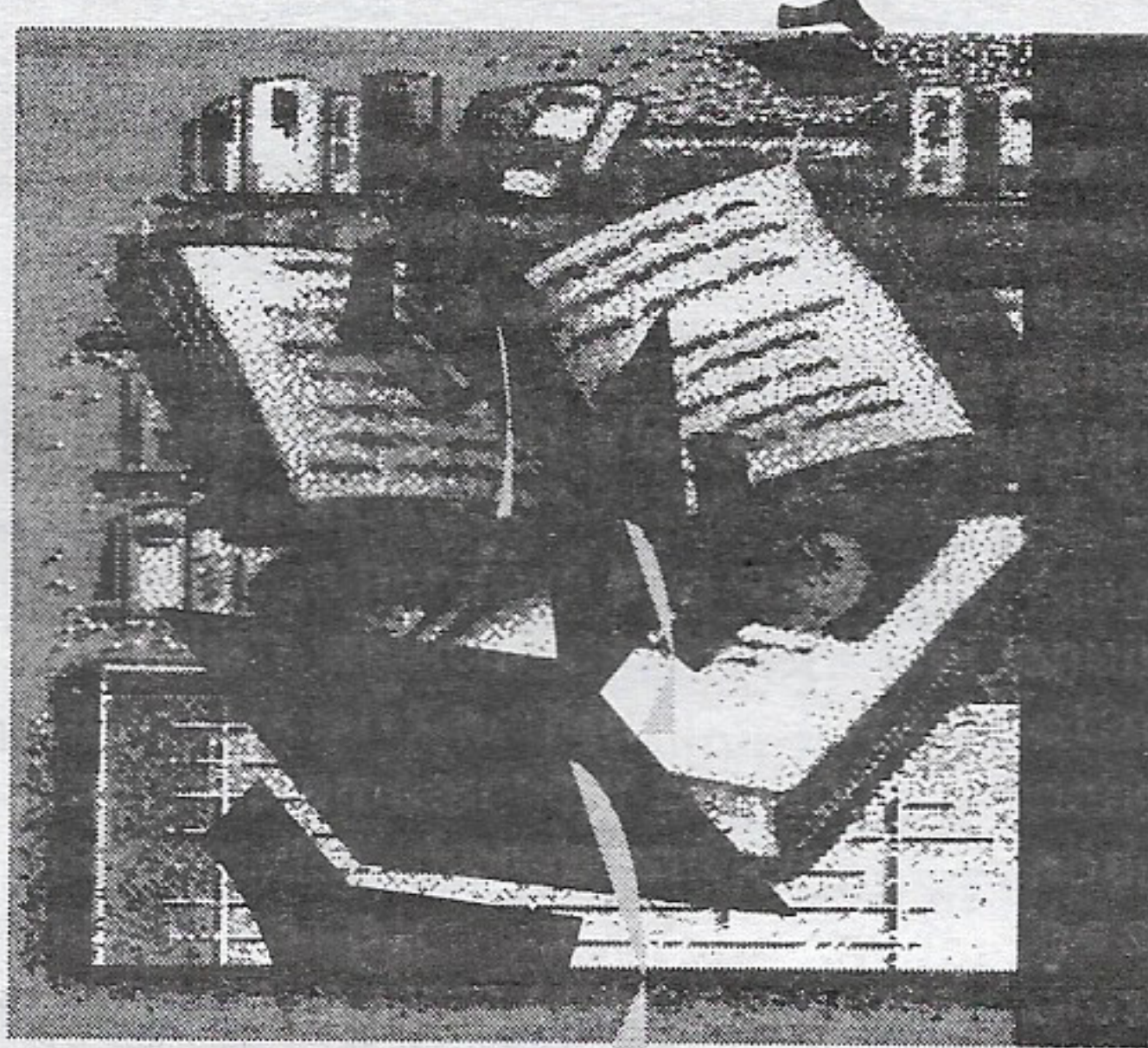
membuat trauma yang cukup berarti. Lambat laun dunia mahasiswa mulai terasing dengan realitas sosialnya. Sistem Pendidikan Nasional pun kemudian tidak luput sebagai alat untuk meredam aktifitas politik mahasiswa. Kehadiran di ruang kuliah, ujian semester, SKS minimal yang harus dipenuhi, tugas-tugas kuliah dan masalah-masalah akademis lainnya, adalah hal-hal utama yang tidak bisa dihindari dengan alasan politis di atas.

Hingga akhirnya ada semangat yang kemudian muncul dipertengahan tahun 1998, ketika mahasiswa coba dibangkitkan dari tidur panjangnya untuk bisa melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Bahwasanya ada penderitaan yang tidak kecil yang harus ditanggung rakyat akibat sistem yang ada, dimana hanya mereka yang kuat secara ekonomilah yang akhirnya mampu berkuasa, sedangkan kelas yang berada di bawah tidak lain hanya menjadi penopang bagi kelas yang di atas.

Kondisi inilah yang sesungguhnya ada, namun oleh negara, ini tidak coba ditampakkan. Dan sangat naïf sekali bagi seorang mahasiswa bila ia berpura-pura tidak tahu dengan kenyataan ini, padahal tanpa ia sadari, bagaimana beban derita yang harus ditanggung oleh rakyat untuk membayar pajak yang tidak sedikit guna membiayai studi mereka.

Memprihatinkan memang, ketika ternyata sistem pendidikan kita hanya mampu menciptakan intelektual-intelektual yang ibarat berada di atas menara gading, terpisah dari realitas social di sekelilingnya.

Bila kita menilik kondisi yang terjadi sekarang ini, ternyata ada situasi yang tidak jauh berbeda pasca diberlakukannya NKK/BKK. Kebangkitan mahasiswa yang terjadi di tahun 1998 ternyata tidak cukup mampu benar-benar menyadarkan mahasiswa dari sikap apolitisnya.

Pilihan pragmatis tidak jarang diambil sebagai langkah aman. Namun juga tidak sedikit mahasiswa yang masih tetap konsisten bergerak menyuarakan apa yang sebenarnya memang harus didengar oleh negara.

Kelas mahasiswa sesungguhnya bukanlah kelas tersendiri dalam masyarakat. Bahwa perubahan yang sesungguhnya haruslah didorong dari golongan yang benar-benar tertindas, bukan dari kelas mahasiswa yang dalam sejarah Orde Baru telah mendapat banyak kesempatan dibanding sektor lain yang ada dalam masyarakat yang selama ini harus menghadapi represi militer.

Kenyataan seperti inilah yang seringkali tidak disadari oleh banyak kelas tertindas, sehingga tidak jarang harapan-harapan itu hanya digantungkan pada mahasiswa yang sesungguhnya dalam proses perubahan selayaknya bukan sebagai garda terdepan. Karena seringkali mereka pun harus kecewa bila berhadapan dengan arogansi mahasiswa yang karena intelektualitasnya merasa lebih dibanding kelas lain yang berada dibawahnya.

Seringkali mahasiswa tidak lebih hanya berusaha membangun empati terhadap kelas tertindas, sehingga ia bisa muncul sewaktu-waktu saat terjadinya kekacauan, namun seketika pula hilang bila telah terjadi kestabilan politik. Konsistensi mahasiswa kembali dipertanyakan. Apakah kelas ini yang kemudian mampu dianggap sebagai garda terdepan dalam melakukan perubahan social? ■

**(Dina Mariana)**

# 'SENGSU SASA'

**Sekilas terkesan nama ini sangat tidak nyaman terdengar di telinga, akan tetapi bila lebih jauh kita lihat kepanjangan dari dua kata tersebut, ternyata ada sebuah arti yang sangat mendalam, yaitu susah senang sama rasa. Inilah yang menjadi nama dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum UGM.**

Seperti layaknya penyambutan mahasiswa baru yang terjadi dari tahun ke tahun, pada kali ini pun Fakultas Hukum menyelenggarakan Inisiasi Kampus dengan mengangkat tema "kerakyatan". Inisiasi Kampus fakultas yang berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 6-8 September 2001 kali ini memang membawa wajah baru yang tidak seperti biasanya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Adanya target berupa pembangunan empati social mahasiswa baru terhadap realitas yang terjadi di masyarakat, sungguhlah merupakan sebuah konsep yang ideal. Hal ini beranjak dari kondisi mahasiswa yang terjadi belakangan, dimana mulai berkembang sikap-sikap pragmatis dikalangan sebagian besar mahasiswa, khususnya setelah diberlakukannya Otonomi Kampus.

Peredebatan mengenai metodologi dan tekhnis pelaksanaan dari Inisiasi Kampus ini memang cukup alot dan memakan waktu yang tidak sedikit, karena ternyata ketika pada dataran konsep telah disepakati secara bulat, namun saat diturunkan ke metodologi, ternyata hal tersebut mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak. Tidak sedikit kemudian yang mengatakan bahwa Inisiasi Kampus kali ini merupakan ajang pembodohan terhadap mahasiswa baru. Namun hal ini segera dibantah oleh ketua SC (staring Commite) yang mengatakan bahwa metode yang dipakai adalah mahasiswa baru (maba) coba dimasukkan dalam masalah bukan Cuma sekedar hadap masalah, artinya maba harus benar-benar ikut merasakan apa yang namanya penderitaan yang selama ini ditanggung oleh kelas bawah (buruh, petani, KMK dan kaum marginal lainnya). Hal ini dirasakan lebih efektif untuk mencapai targetan yang ingin dicapai.

Konflik ini pun tidak serta merta selesai ketika rasionalisasi itu coba disosialisasikan ditingkatan LSO yang ada. Ketidakpuasan dari sebagian mahasiswa atas kerja panitia penyambutan maba tetap terlihat dengan maraknya isu yang bergulir dan munculnya berbagai selebaran yang isinya mencoba memberikan pemaparan akan sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang maba.

Situasi fakultas hukum yang semakin menghangat dari hari ke hari, sesungguhnya tidak bisa kita maknai sebagai suatu kehancuran fakultas ini saja, tapi bila kita tilik lebih jauh, hal ini bisa berarti proses pendewasaan diri dan pembukaan ruang-ruang demokrasi yang selama ini terlihat anteng-anteng saja. Terlepas dari semua permasalahan yang ada seputar pra kondisi pelaksanaan penyambutan maba, sebenarnya ada satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwasannya semua perdebatan yang terjadi selama ini mempnyai satu tujuan yang sama, yaitu memberikan yang terbaik buat mahasiswa baru, agar mereka nantinya siap ketika memasuki dunia mahasiswa dan diharapkan nantinya mereka tidak hidup sendiri sebagai seorang intelektual yang berada di atas menara gading terlepas dari realitas sosialnya.

Ketika semua elemen punya satu tujuan yang sama, inilah keseragaman yang juga harus kita lihat. Bahwaannya sudah jelas, tidak ada satu pihak manapun yang menginginkan adanya proses pembodohan terhadap maba, semua dilakukan untuk kepentingan maba nantinya.

Tekhnis pelaksanaan yang berupa keterlibatan mahasiswa baru dalam realitas masyarakat kelas bawah, dengan wujud simulasi yang berupa keterlibatan mereka sebagai seorang pemulung, pengamen dan lainnya, sesungguhnya belumlah pernah kita coba dan ini merupakan teskis untuk melihat out put dari Inisiasi Kampus kali ini.

Tapi yang perlu diingat adalah, waktu 3 hari sesungguhnya tidaklah cukup untuk merubah watak seseorang, yang jadi catatan untuk semua pihak bahwa perlu back-up setelah pelaksanaan Inisiasi Kampus kali ini, sehingga apa yang menjadi targetan semua elemen tidak selesai dalam waktu yang singkat tersebut, inilah yang selama ini luput dari perdebatan. Tidak ada yang mencoba membicarakan hal yang lebih strategis ketimbang hal taktis yang ternyata cost-nya terlalu mahal, sebagai konsekuensi yaitu munculnya konflik yang itu tidak cukup sehat dan memberikan kesan kurang baik dihadapan siapa pun■

**(Dina Mariana)**

# 50 Filsuf Kontemporer ' John Lechte'

Judul buku :
50 Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas
Penulis : John Lechte
Penerjemah : A.Gunawan Admiranto
Penerbit : KANISIUS 2001
Tebal : 380 halaman
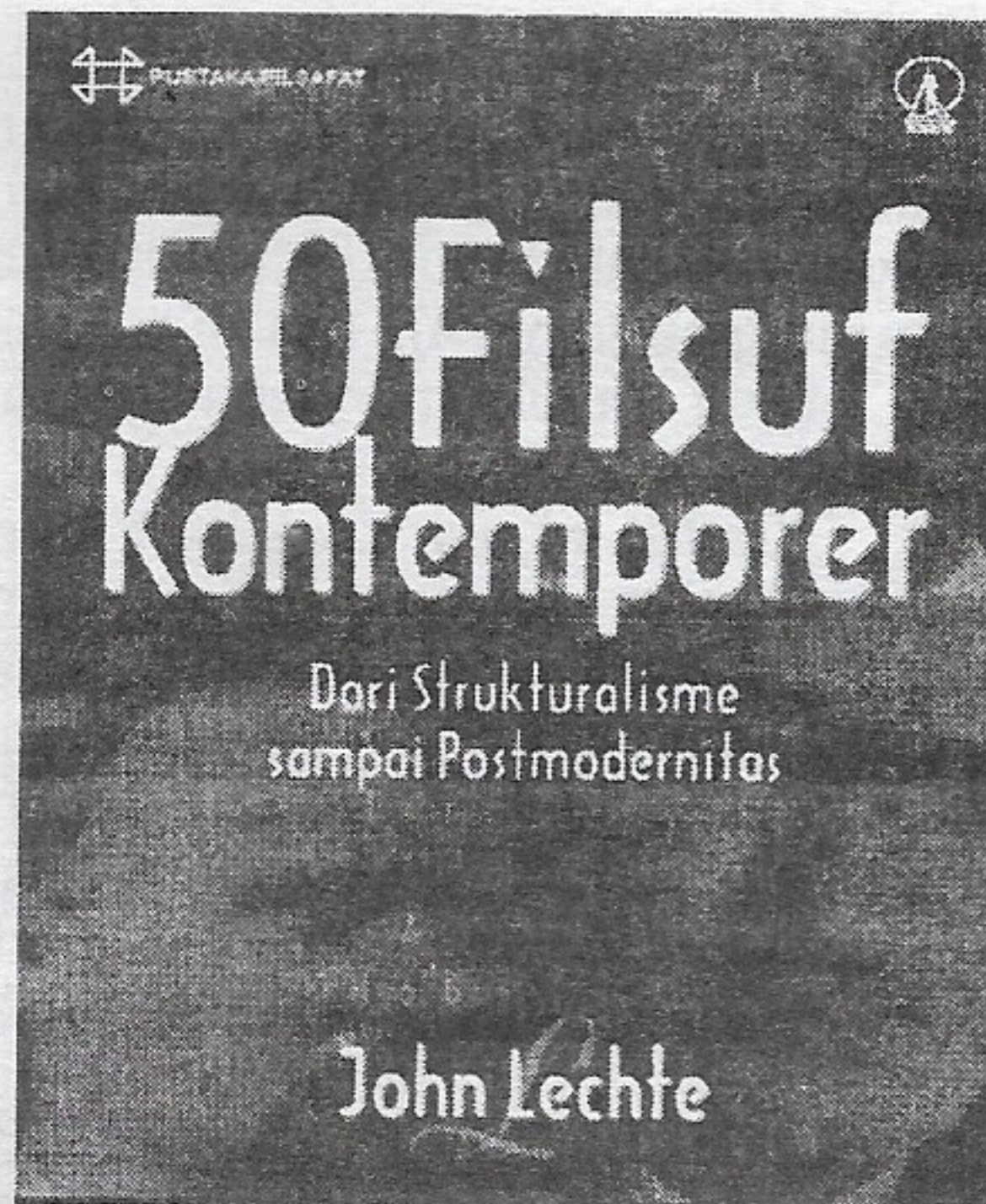
John Lechte, pengajar teori sosial dan sosiologi representasi di Macquarie University, Australia, pernah menjadi murid Julia Kristeva, yang sekaligus juga aktif di bidang sejarah, semiotika, dan politik, bahkan juga menaruh minat besar pada Psikoanalisis, dengan buku yang berjudul asli "*Fifty Key Contemporary Thinkers*" ini, mencoba mengulas perkembangan teori strukturalis dan juga para tokoh pemikir yang menentang kecenderungan tersebut. Buku *50 filsuf kontemporer* ini mencoba membawa kita dari strukturalisme awal, ke strukturalisme, sejarah struktural, pemikiran post-strukturalis, semiotika, feminisme generasi kedua, post-Marxisme, modernisitas hingga Postmodernisitas. Di dalamnya dibahas tokoh-tokoh seperti Bakhtin, Freud, Bordieu, Chomsky, Derrida, Lacan, Kristeva, Saussure, Irigaray, Kafka, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang selama ini telah mengubah konsepsi kita mengenai bahasa, para filsuf, ahli linguistik, teoritikus sosial, feminis, dan sejarawan dengan pemikiran mereka.

Buku John Lechte, seperti yang telah dikemukakannya pada Prakata buku yang ditulisnya sendiri. Walaupun 'mengikuti' karya Diane' Collinson (*Fifty Major Philosophers*-1987), tetapi tidak meninjau seluruh pemikiran pokok filsafat Barat, seperti karya Diane' yang mengeksplisitkan berbagai pemikiran yang telah membentuk kita semua selama ini. Malahan Lechte lebih menguraikan aspek-aspek pokok pemikiran para tokoh yang kadang-kadang belum banyak dikenal, meskipun ada yang mulai dikenal. Tapi itu bukan tanpa alasan. "Meskipun kita bisa berdebat tentang siapa yang bisa diletakkan dalam bangunan pemikiran Barat ini, kita tidak akan terlalu banyak berdebat tentang siapa yang berpengaruh di dalamnya. Kita bahkan bisa berbicara tentang Plato, Hobbes, atau Sartre tanpa perlu mengetahui mereka. "Lechte menjelaskannya langsung dalam Prakata tersebut. "Banyak yang sudah mendengar nama Plato, tetapi berapa banyak yang pernah mendengar nama Saussure? Banyak yang tahu bahwa idealisme ada dalam filsafat Plato. Tetapi tahukah mereka bahwa *difference* merupakan gagasan utama dalam karya Saussure? Saya yakin bahwa jawaban atas keduanya adalah "tidak". "Lanjutnya.

Dalam buku ini Lecthe tidak hanya berusaha menyinggung pengetahuan pembaca saja, tapi juga pengetahuannya sendiri. Kontras yang diperlihatkannya adalah kontras antara bangunan filsafat yang dia pahami dengan baik. Kendati tidak sampai rinci, dengan sederet pemikir yang pemikiran-pemikirannya masih terus berkembang, entah karena mereka memang masih atau sedang menggali dan menuliskannyaataupun juga karena tidaklah mungkin mengakrabi pemikiran-pemikiran yang sangat kontemporer dan inovatif. Dengan demikian Lecthe menganggap pilihannya tentang seorang pemikir bisa, dan seharusnya, menjadi bahan perdebatan.

Lecthe secara langsung memberitahukan cara pemilihan dan penentuan para pemikir tersebut. Arah yang diambil itu bisa dilihat dalam anak judul buku ini. Para pemikir yang diambilnya adalah yang bisa memberikan pemahaman lebih mendalam tentang orientasi pemikiran strukturalis pasca-perang dunia II, yang terutama berkembang pesat di Perancis. Memang yang menjadi pusat perhatiannya adalah masa sesudah perang, tetapi lecthe tidak berarti mengesampingkan masa yang lain. Dia juga berupaya memasukkan pemikir yang secara kronologis berada dalam generasi lain (Saussure, Frued, Nietzsche) yang menyemaikan wawasan baru serta secara intelektual cukup kontemporer. Oleh sebab itu, "Kontemporer" lebih daripada sekedar kontemporer secara kronologis.

Disini terlihat pula bahwa Lecthe lebih banyak mengarahkan untuk menampilkan para pemikir yang mewakili orientasi struktural dan post-struktural, modern dan post modern, maka oleh Lecthe dimasukkan juga beberapa orang yang tidak atau kurang sepaham dengan orientasi ini (Adorno, Habermas) yang pasti terlalu penting untuk dilewatkan begitu saja.

Sembilan kategori pengelompokan oleh Lechte, seperti yang telah disebutkan di atas, selalu di awali oleh Lechte dengan catatan pendahuluan singkat untuk memberikan garis besar tentang arah yang di ambil para pemikir tersebut. Dijelaskan oleh Lechte bahwa hal itu bukan untuk pengelompokkan yang terlalu reduktif. Akan tetapi untuk menunjukkan arah orientasi belaka yang dapat membantu para pembaca dalam mencerna makna global antologi pemikir tersebut, yang bila dipakai secara arif bisa membantu dalam upaya pemahaman sampai ke tingkat yang lebih individual.

Disebutkan juga oleh Lecthe bahwa buku ini bukanlah ditampilkan sedemikian rupa untuk mengurangi kebutuhan pembaca untuk mencari bacaan tambahan dalam rangka memantapkan pengetahuan pembaca sendiri. Bukan pula sebagai suatu pengganti segala usaha membaca pemikiran mereka, tetapi untuk menawarkan cara dalam upaya memahami pemikir yang bersangkutan. Untuk itu bagi pembaca sekalian, buku ini pantaslah menjadi salah satu rujukan wajib mengenai revolusi intelektual terpenting abad kedua puluh, dan kali ini diterbitkan Kanisius dalam edisi Pustaka Filsafatnya.

(Luthfi Widagdo E)

# Betapa Mengecewakan Kuliah di FH UGM

Mungkin saya juga pernah merasakan apa yang teman-teman mahasiswa baru rasakan sekarang, merasa bangga telah diterima di salah satu fakultas tertua di universitas negeri tertua di jagad negara ini. Waktu itu saya juga membayangkan akan mendapatkan banyak ilmu di sini. Saya membayangkan akan mendapat dosen-dosen berkualitas yang akan membahas permasalahan hukum di negeri ini dan membicarakan apa yang harusnya dilakukan. Menjadikan saya seorang ahli hukum,

Tapi perasaan dan bayangan itu tak lama kemudian berubah menjadi kekecewaan. Kecewa sejak hari pertama dengan kuliah yang saya alami. Bayangkan, pendidikan semacam apa yang hampir tiap kuliah selalu diikuti oleh 300-an mahasiswa? Bahkan beberapa kali ruang kuliah tidak mampu menampung jumlah peserta kuliah. Dan itu bakalan saya terima sampai saya lulus nanti.

Celestine Freinet (lahir 1896) pernah mendaftar tak kurang dari 30 butir sebagai konstanta-konstanta yang harusnya juga dipenuhi dalam proses belajar mengajar. Misalnya, baik anak maupun orang dewasa tidak suka disuruh baris berbaris, menerima perintah secara pasif, kelas dengan jumlah murid terlalu banyak dari pedagogik selalu keliru.

Pak Umar Sahid--kepala sekolah saya waktu SMP yang hanya bergelar drs--saja menyadari hal itu,. Dia membatasi jumlah siswa perkelas tak boleh lebih dari 40 anak. Tapi sayang pengurus fakultas yang selalu menulis berderet-deret gelar di sekeliling namanya, tak paham soal ini.

Yang saya tahu mereka berlindung dibalik pemakluman bahwa kampus yang usianya lebih tua dari negeri ini memiliki keterbatasan fasilitas. Fakultas ini hanya memiliki 1 ruang kelas saja (hanya satu ruang!!!), yang terkenal dengan nama ruang satu itu. Fakultas agak terbantu dengan adanya ruang kuliah bersama sospol-hukum yang dapat jatah 3 ruang. Praktis fakultas hukum hanya memakai 4 ruang kelas untuk memendidik sekitar 1500 mahasiswa.

Banyaknya peserta dalam satu kelas tentunya tidak kondusif untuk kegiatan mendidik. Komunikasi yang tercipta satu arah, mahasiswa cenderung pasif menerima ajaran. Hal ini diperparah dengan gaya mengajar dosen yang rata-rata ingin tampak seperti orator ulung, mereka cenderung hanya membaca transparansi yang mereka punya, padahal tak sedikit diantara tranparansi yang mereka pakai dibuat beberapa tahun yang lalu. Tiap tahun mereka melakukan rutinitas yang sama, membaca tranparasi di depan ratusan mahasiswa.

Dan mahasiswa yang baik akan mencatat seluruh kalimat yang diucapkan sang dosen, menghafalkannya dirumah karena dua kalimat dari yang diucapkan sang dosen hari ini bakal menjadi jawaban pertanyaan ujian nanti.

Tapi setidaknya saat itu saya menemukan biang masalah hukum yang menggerogoti negara ini. Saya berkeyakinan permasalahan hukum negeri inisistem, materi dan penegakan asal masalahnya tidak jauh-jauh. Biang permasalahannya menurut saya bermula di kelas-kelas fakultas hukum.

Kondisi itu sangat memprihatinkan apalagi sesungguhnya fakultas ini konon harusnya tak miskin-miskin amat. Fakultas Hukum mempunyai beberapa sumber dana yang cukup potensial. Mulai dari Program Notariat yang perlu belasan juta untuk menjadi peserta didik disana, juga program-program pasca sarjana lainnya. Apalagi mulai dua tahun ini Fakultas membuka program ekstensi--lepas dari perdebatan idealisme pembukaan program ekstensi--yang logikanya mampu memberi tambahan dana untuk keuangan fakultas.

Tapi sayangnya kemunculan tambang-tambang dana tadi tidak diikuti oleh perbaikan fasilitas pendidikan. Dari dulu Fakultas Hukum ya hanya punya satu ruang dan perpustakaan yang lebih mirip museum (dan lokasinya yang tidak aksesibel).

Bahkan institusi pendidikan ini tidak menganggarkan dana untuk menyekolahkan para dosennya. Seorang dosen beberapa waktu lalu mengajukan permohonan dana untuk mengambil program doktoral di Singapura. Jawaban yang dia terima, 2 tahun ini fakultas tidak mempunyai anggaran untuk pendidikan para dosen. Bayangkan, institusi pendidikan tinggi macam apa yang tidak mempunyai anggaran untuk peningkatan kualitas pendidik!!

Jika keinginan sang dosen tadi sekedar ingin melanjutkan kuliah, mungkin bagi dia bukan suatu masalah. Beberapa fakultas hukum universitas swasta mendekati dia, menawarkan dana yang dia butuhkan untuk mengambil program doktoral, asalkan sepulangnya dia harus mengajar penuh di fakultasnya dan dengan gaji 2 kali lipat yang dia terima sekarang. Tawaran yang menggiurkan memang. Tapi bagi fakultas tadi, harga itu sangat murah karena dia membeli dosen yang sudah jadi.

Bayangkan (lagi), bagaimana bila semua dosen yang berkeinginan kuliah di luar--yang notabene ada keinginan untuk majumendapat tawaran serupa dan menerimanya. Dosen berkualitas macam apa yang akan tetap menjadi pengajar kita nantinya?

Juga minimnya kepedulian fakultas pada bidang-bidang penerapan keilmuan. PKBH misalnya. Saya melihat pendirian PKBH (oleh pengurus fakultas) tak lebih sekedar penyumpal mulut. Akhir tahun 1998 terjadi demonstrasi yang lumayan marak, salah satu tuntutannya adalah pendirian laboratorium hukum, semacam LBH fakultas.

Pengurus Fakultas (waktu itu) tampak responsif terhadap tuntutan satu ini. Mereka mengelurkan SK pendirian PKBH, membersihkan gudang yang ada di sebelah ruang 1 sebagai kantornya dan mengusahakan surat ijin praktek pengacara untuk sekitar 10 orang dosen. Tapi *ya* hanya sekedar itu. Setelah mendirikan, fakultas tak mau tahu kelanjutan PKBH, bahkan tak menganggarkan dana rutin untuk PKBH.

Harusnya LBH fakultas menjadi tempat fakultas hukum menerapkan keilmuannya sekaligus membentuk idealisme para mahasiswanya. Banyak fakultas hukum di universitas lain yang sangat peduli dengan hal ini dan sadar pula dengan dana yang harus mereka anggarkan. LKBH UII misalnya, tiap tahun menerima dana rutin dari fakultas 150 juta. Fakultas juga gagal merangsang para dosen untuk aktif di PKBH (atau bahkan fakultas merasa ini bukan hal yang perlu?).

Lalu dari mana PKBH menutupi segala kebutuhannya selama ini? Saya terlalu sedih menuliskannya disini.

Ketakutan saya, kondisi yang tampak nggak bener ini dikarenakan buruknya iktikad--dak terlalu berani untuk menulis 'moral'--para pengurus fakultas. Semoga tuduhan ini nggak benar, tapi melihat kasus pengemplangan kenaikan gaji belasan bulan karyawan honerer yang terungkap beberapa waktu lalu, cukup membuat saya lebih takut bahwa tuduhan itu benar. ■

(Emte Aminulloh)
Mahasiswa FH UGM 98
*(Emte@aminulloh.com)*

# Memahami Benturan Antar Kelompok

Peradaban manusia modern merupakan resultante dari akumulasi yang berkepanjangan dari sejarah peradaban masa lalu manusia.Berbagai komunitas dengan identitasnya yang juga menumbuhkan sub-sub kebudayaan baru,berkembang sangat kompleks.Budaya menjadi identitas inheren dengan pribadi,kelompok,dan komunitas tertentu.Dalam class of civilization/ benturan antar peradaban ;Huntington menulis "...simbol-simbol identitas kultural lainnya yang tak terhingga termasuk palang salib,bulan sabit dan bahkan tutup kepala.Hal ini berarti kebutuhan dan identitas budaya sangat berarti bagi sebagian orang.Orang-orang seringkali menggunakan identitas (budaya) baru yang sesunguhnya merupakan peninggalan masa lalu dan bernaung di bawah bendera baru pada hal sebenarnya peninggalan moyang dan seringkali mengantarkan pada pertikaian dengan musuh-musuh baru,yang tidak jarang adalah musuh-musuh lama...".Paradigma interaksi global menjadikan budaya sebagai pusat kendali utama,dari padanya muncul persahabatan,dan sekaligus permusuhan.

Bayang-bayang paradigma peradaban modern dengan segala benturannya yang kompleks secara teknis merambah semua bentuk kumpulan manusia yang terintegrasi.Berbagai kelompok mempunyai identitas yang tidak jarang merupakan tradisi yang diwariskan dan dipertahankan.Dalam kelompok tersebut egosentrisme induvidu dipatahkan oleh hegemoni kelompok,sehingga untuk selanjutnya eksistensi kelompoklah yang dikedepankan.Tidak heran bila dibanyak tempat,orang yang pintar menjadi begitu bodoh dalam kelompoknya.Ekspresi paradigma global juga ditransformasikan dalam bentuk lain kedalam masyarakat kampus.Berbagai elemen mahasiswa terkadang merupakan konstruksi identitas yang bisa saja "membangun" tetapi juga merupakan "langkah mundur" yang menggelisahkan.Kompleksitas seperti itu merupakan dinamika yang wajar ternyata dari kodratnya manusia tidak lebih dari kompilasi permainan emosi dan nalar yang terkadang lemah-lembut dan disaat lain menjadi makhluk yang sangar dan buas.Harus diingat kita adalah binatang yang mampu berfikir.Bahkan keunggulan itulah yang bisa membangun manusia menjadi makhluk yang paling berbahaya.Dari sisi ini kita bisa mentolerir perilaku kekerasan yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok manusia.

Di sisi lain,rasio yang sehat dan bekerja secara baik merupakan senjata positif yang membangun struktur kejiwaan yang sehat.Artinya dengan rasio manusia mampu berfikir lebih analitis,lebih sabar,dan mempunyai srategi yang tepat.konstruksi seperti itu

selalu membentuk keseluruhan identitas manusia yang kemudian diakomodasi dalam realitas kelompok.Adalah sangat berbahaya kalau kelompok menjadi kekuatan yang represif.Karna setiap elemen aktifnya akan mendukung simbol yang sama.Meminjam istilah Prof.Sahetapy untuk MA kita; "...Ada semangat membela Korps...".

Identitas selalu menjadi karakter subyektif manusia.Identitas menjadi destruktif kalau ada unsur kekerasan.Kekerasan bisa diartikan sebagai penghilangan hak orang lain baik secara paksa maupun lewat hegemoni yang tak terasa,perilaku kekerasan merupakan bom waktu yang berantai.Konsekuensinya akan dirasakan dalam semua segi kehidupan yang secara simultan bisa lebih masif dari aksi fisik kekerasan itu sendiri.Membunuh orang merupakan pekerjaan yang mudah.Tetapi beban psikilogis[kalau masih berjiwa manusia]dan dendam kesumat dari pihak keluarga korban, senantiasa siap diletuskan.Dalam relevansinya dengan kelompok dalam kampus/fakultas kita ini, identitas merupakan pluralisme yang wajar, bahkan memperkaya konfigurasi sistem.Seperti halnya dalam partai politik, persaingan untuk merebut dukungan masa senantiasa dibarengi dengan usaha konsolidasi untuk memperkuat integritas[walaupun sering dengan uang politik]. Introspeksi internal untuk "berkaca" menjadi sangat penting.Paradigma dan visi yang diusung selalu dikaji agar bentrok konsep tidak menjadi bentrok fisik."Berkaca" selalu bermakna positif.Yang penting kacanya tidak kabur atau dipecahkan kalau wajah terlihat jelek penuh bopeng.Di dalam cermin itu akan terpantul realitas identitas kita.Quo vadis identitas ?

Pendekatan kosmologi

Alam memiliki harmoni yang bekerja secara sistematis, jalin-menjalin sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Memahami alam tidak bisa dipatok dengan harga mati pragmatisme,tetapi perlu dikaji secara komprehensif, karna perubahan terhadap yang satu selalu berarti perubahan bagi yang lain sehingga secara gradual kosmos akan mengalami perubahan secara keseluruhan.

Sistem hubungan sosial manusia, secara khusus dalam fakultas tercinta ini perlu menimba ilmu dari dinamika alam.Interaksi manusia kalau sudah melibatkan kelompok akan turut mempengaruhi kelompok yang lain.Secara perlahan kelompok lain juga akan mengambil sikap, sebagai reaksi self defencenya, sehingga cepat atau lambat seluruh kelompok akan mengalami perubahan wajah.

Dengan demikian kita perlu memberi batasan bagi prilaku kita, agar imbasnya tidak merembes ke kelompok lain. Atau jangan-jangan kita sudah terprevelensi penyakit para politisi.Mentang-mentang musuhnya tidak mau tunduk , wajah sendiri "disiletin" sehingga menjadi alasan untuk "menggebuk" lawan.Sebuah filosofi dalam ilmu kungfu barangkali penting untuk kita: "rival selalu merupakan batu kristal yang memberi cahaya dan batu asah yang memberitahu kita bahwa ketajaman diukur dari seberapa ssering kita mempertemukan diri, berinteraksi, dan membangun sesuatu yang lebih berguna" ■

.[Stenly]

# Polarisasi Gerakan Mahasiswa

## Oleh : Abhisam DM*

*Gelora perjuangan "Revolusi Mei" 1998 masih terngiang-ngiang di telinga kita. Gegap gempita dan riuh rendah aksi penumbangan seorang diktator dengan satu aktor utamanya: mahasiswa, terasa seakan baru kemarin. Peran mahasiswa yang nyaris melegendaris ini seharusnyalah menyisakan secercah kebenaran yang bersih daripadanya.*

Memang gerakan mahasiswa kembali menjadi kategori politik yang patut dipertimbangkan di Indonesia. Setidaknya tercatat dua kali proses politik penting dalam perjalanan sejarah Indonesia yang diwarnai oleh sektor masyarakat ini sekaligus menyumbangkan kontribusi pentingnya dalam moment transisi penguasa. *Pertama*, gerakan mahasiswa tahun 1966, yang berhasil menjatuhkan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. *Kedua*, gerakan mahasiswa yang bangkit pada tahun 1990-an yang berkulminasi pada "peristiwa Mei" 1998, dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto yang dulu turut dinobatkan oleh gerakan mahasiswa sebelumnya, "sedikit" ironi sejarah memang telah terjadi.

Apa yang bisa kita lihat sekarang, menyangkut situasi nasional yang sedang berkembang, menunjukkan bagaimana gerakan mahasiswa semakin terpecah-pecah (terpolarisasi). Dalam menyikapi konflik elit politik yang semakin tajam sebagai fokus utama dari situasi nasional yang sedang berkembang misalnya, gerakan mahasiswa terpecah-pecah dalam beberapa kubu. Mulai dari yang bersikap "acuh tak acuh" terhadap konflik, menuntut semua elit politik mundur, menuntut pembubaran Partai Golkar sebagai kekuatan utama Orde Baru, hingga yang menuntut Gus Dur mundur karena dianggap gagal *plus* serentetan kasus-kasus KKN-nya.

Dalam kacamata konvensional tentu *image* yang terbentuk adalah gerakan mahasiswa sudah tidak bisa diharapkan lagi, karena sudah tidak solid dan terpolarisasi begitu tajam. Namun sesungguhnya telah terjadi kesalahan cara memandang polarisasi hanya dari satu seginya saja, yakni segi negatif, yang bisa menyebabkan hilangnya arah positif gerakan mahasiswa ke depan. Harus dicamkan dalam-dalam, bahwa kenyataan/realitas apapun memiliki dua segi, segi yang negatif dan segi yang positif; di dunia ini, tidak ada satu hal ihwal pun yang hanya bersegi satu, yakni hanya segi negatif atau positifnya saja. Dan gerak (*motion*) maju sejarah merupakan hasil pergulatan (*contradictions*) segi yang negatif dengan segi yang positif. Tanpa pemahaman ini kesalahan cara memandang polarisasi akan berlanjut, yakni idealis-romantis dalam memandang polarisasi, seolah-olah polarisasi dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak boleh terjadi. Padahal, harus diakui bahwa polarisasi merupakan
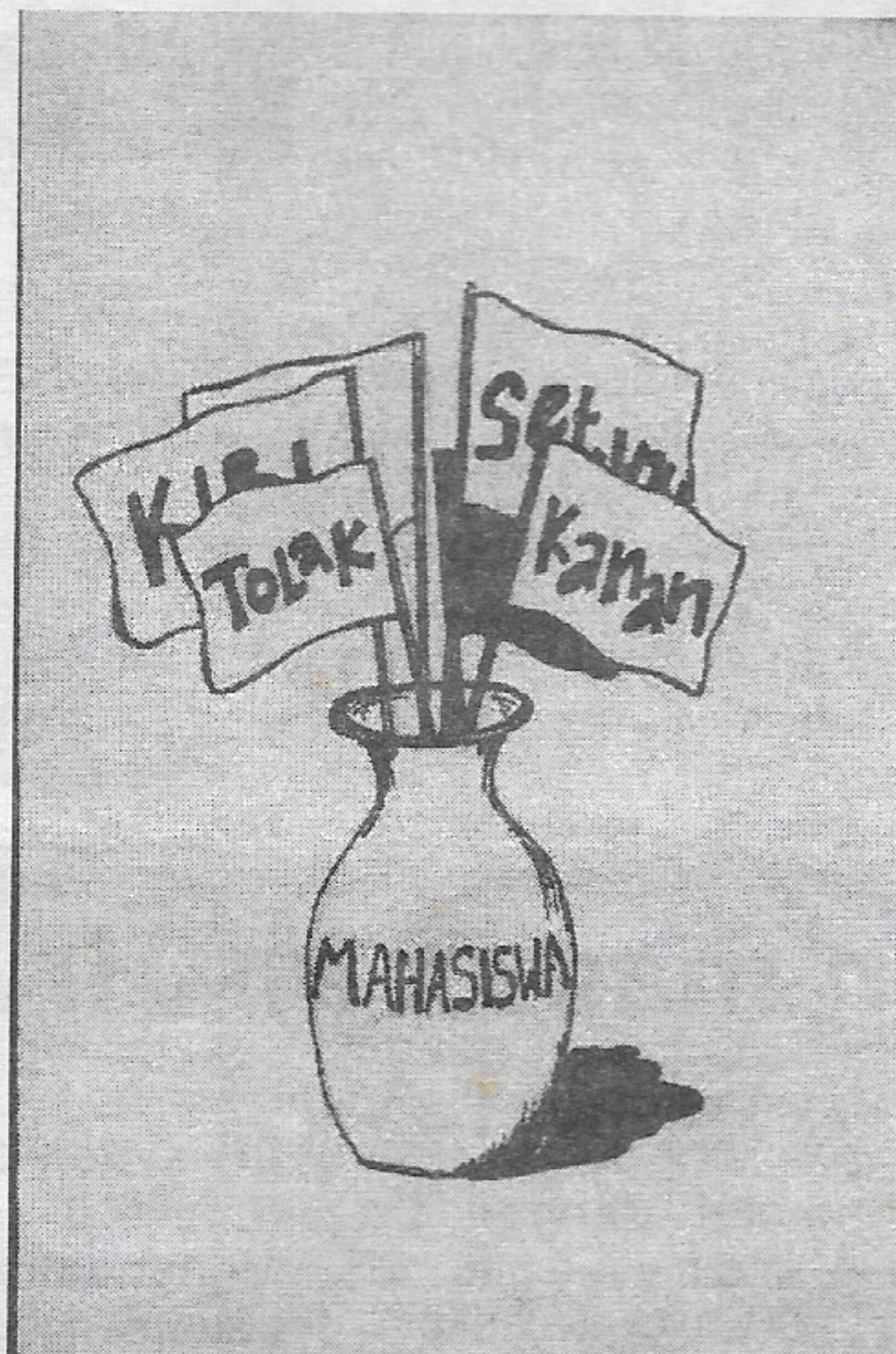
konsekuensi logis dari ideologi, garis politik dan keorganisasian pergerakan. Singkatnya, polarisasi haruslah dipandang sebagai lompatan kualitatif gerakan mahasiswa, berikut konsekuensi logis dari pemilihan ideologi, politik dan organisasinya.

Jujur terhadap sejarah, ini yang dibutuhkan untuk memandang dengan kacamata progresif bahwa polarisasi pergerakan (mahasiswa ataupun lainnya) telah terjadi selalu terjadi bahkan-sepanjang sejarahnya. Ketika pemaknaan terhadap polarisasi benar-benar didasarkan pada dilaektika sejarah (tidak a-historis) maka sesungguhnya yang terbaca adalah dinamika pergerakan sebagai wujud lompatan kualitatifnya.

Lebih jauh lagi, kedewasaan dan kesadaran politik mahasiswa akan diuji untuk tumbuh dan berkembang disini. Kedewasaannya akan diuji melalui bagaimana ia menyikapi perbedaan yang ada, dengan membuang jauh-jauh sifat kekanak-kanakannya tentu. Sementara kesadarannya akan diuji melalui proses bagaimana ia menentukan pilihan-pilihannya di tengah bermacam pandangan yang berkembang. Bukankah mahasiswa bukan hanya sekadar "kumpulan itik" yang geraknya telah dibatasi dalam suatu "ladang penggembalaan?"

*Mahasiswa FH UGM Angkatan 98

Ketua Majestik 55 FH UGM

Catatan Kaki :

1.Sudah cukup banyak pakar,pengamat sosial politik yang membuat pemetaan-pemetaan gerakan mahasiswa dalam menyikapi konflik elit politik yang semakin tajam.

2.Pada awal-awal tahun 90-an misalnya, gerakan mahasiswa terpecah dalam dua kubu besar, FAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia) yang mengangkat isu-isu elit dan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi ) yang mengangkat isu-isu kerakyatan. Atau dengan skala yang lebih besar, revolusi kemerdekaan 1945 yang memunculkan banyak organisasi pergerakan dengan pilihan ideologi ,politik dan organisasi yang berbeda, sehingga strategi perlawanannyapun berbeda-beda, mulai dari perlawanan terhadap penjajah yang paling kompromis sampai yang paling konfrontatif. Akhrnya ketika polarisasi dianggap sebagai sesuatu yang positif,bukan hanya diratapi dan ditangisi, arah positif pergerakan dan perlawanan 1945 mencapai puncaknya seperti apa yang dicita-citakan.

DITERBITKAN OLEH
MAHKAMAH
BPPM FH UGM
Pemimpin umum:Dina Mariana
Sekretaris& Kehumasan :Anang F
Pemimpin Redaksi :Arif M
RedPel Mahkamah News : Steny
RedPel Majalah : Ayu, Inggit
Pemimpin Perusahaan : M Hafid
Ka. Litbang :Arfi B
Bendahara :Syarifah
Staf Redaksi :Doni,Rio,Luthfi,Maya
Nando,Ady,Pepeng,Heny,Reta,Nuki,Saikhu,Indira,Indi,
Andre,Isti,Anita,Herry,Nesty,Syarif,Yulia,Agung,Agus
Staf Perusahaan:Asti,Arief,Pipit,Yuhar,U'ut,Ira,Ifah,Anky
Layout / Edit : Ery / Luthfi
Alamat Redaksi :
Jl. Sosio Justicia II Bulaksumur Yogyakarta
Telp. ( 0274 ) 512781, 901280
Fax.512781
E-Mail :mahkamah@eudoramail.com